EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2022 Per 7 Juli 2022

I. RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN BERSAMA PEMERINTAH (PEMBICARAAN TINGKAT I)

[12 RUU TERDIRI DARI 2 RUU USUL DPR, 5 RUU USUL PEMERINTAH, 1 RUU USUL DPD, 4 RUU KUMULATIF TERBUKA]

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi I Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 3 Februari 2020 MP II 2019-2020 dibahas oleh Komisi I; Surpres Tgl 24 Januari 2020 No. R-05/Pres/01/2020
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR/ ANGGOTA	RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi II Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 3 Desember 2020 MP II 2019-2020 dibahas oleh Komisi II Surpres tgl 12 Juni 2020 No.R-28/Pres/06/2020 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 2 April 2020 Selesai Harmonisasi Tgl 19 Februari 2020 Surat Pengusul (2 orang Anggota dari Fraksi Gerindra) No.2127/II/2020, Tgl 5 Februari 2020, permintaan utk di harmonisasi
3	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi III Surpres No. R-02/Pres/01/2022 tgl 14 Januari 2022
4	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk I di Komisi III (RUU Carry Over dari Periode 2014-2019)
5	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Komisi III Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 31 Agustus 2021 dibahas oleh Komisi III Surpres tgl 3 Agustus 2021 nomor R-35/Pres/08/2021
6	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen)	PEMERINTAH	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus Surpres tgl 8 Oktober 2020 nomor R-42/PRES/10/2020
7	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	RUU sedang proses Pembicaraan Tk. I di Pansus Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 16 Juni 2020 MP IV 2019-2020 dibahas oleh Pansus Surpres Tgl 20 Mei 2020 Nomor : R-24/Pres/05/2020 (Mendagri, Menkeu, Bapennas, Menlu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menkumham)

	Per / Juli 2022		
NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
8	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR/ BADAN LEGISLASI	 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 30 September 2021 Selesai Penyusunan Tgl 23 September 2021 Surpres Tgl 2 Desember 2021 Nomor: R- 55/Pres/12/2021 (Mendikbudristek, Menkes, Mendagri, Menkeu, MenpanRB, dan Menkumham) Surat Bamus untuk dibahas oleh Badan Legislasi
9	Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan	PEMERINTAH	Pembahasan di Komisi I Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 3 Feb 2022 RUU Kumulatif Terbuka
10	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Parthership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).	PEMERINTAH	Pembahasan di Komisi VI Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 3 Feb 2022 RUU Kumulatif Terbuka
11	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea).	PEMERINTAH	Pembahasan di Komisi VI Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 3 Feb 2022 RUU Kumulatif Terbuka
12	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).	PEMERINTAH	Pembahasan di Komisi VI Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 3 Feb 2022 RUU Kumulatif Terbuka

II. RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I [5 RUU TERDIRI DARI 3 RUU USUL DPR, 1 RUU USUL PEMERINTAH DAN 1 RUU KUMULATIF TERBUKA]

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Barat Daya	DPR/KOMISI II	Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 7 Juli 2022 Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi (B/1039/LG.01.01/1/2022 tanggal 17 Januari 2022) RUU Kumulatif Terbuka
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR/ KOMISI IV	 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 7 Juli 2022 Selesai Harmonisasi Surat Pengusul (Komisi IV) permintaan Harmonisasi (Surat No. 108/Kom.IV/DPR RI/XI/2021 tgl 30 November 2021)
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR/ANGGOTA	 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 30 Juni 2022 Selesai Harmonisasi Surat Pengusul (Anggota) permintaan Harmonisasi (Surat No. B.III.1316/FPKB/DPR-RI/I/2022)
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.	DPR/ KOMISI VII	 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 14 Juni 2022 Selesai Harmonisasi Surat Pengusul (Komisi VII) permintaan Harmonisasi (Surat No. LG/09047/DPR RI/VII/2021 tgl 5 Juli 2021)
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	PEMERINTAH	Surpres sudah disampaikan ke DPR RI

III. RUU DALAM TAHAP HARMONISASI DI BADAN LEGISLASI DPR RI [13 RUU TERDIRI DARI 4 RUU USUL AKD, 9 RUU KUMULATIF TERBUKA]

	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,			
NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN	
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/ BADAN LEGISLASI	Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR Selesai penyusunan Badan Legislasi Tgl 1 Juli 2020	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/ ANGGOTA	Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR Selesai Harmonisasi Tgl 4 September 2020 Surat Pengusul (12 Anggota FP Nasdem) No. F.NasDem.054/DPR-RI/II/2020 tgl 6 Februari 2020 permintaan utk diharmonisasi	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Dalam Prolegnas berjudul Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan	DPR/ KOMISI XI/ PEMERINTAH	RUU dalam tahap harmonisasi Surat pengusul (Komisi II) permintaan Harmonisasi (Surat No. B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022)	

	T ET 7 JUIT 2022		
NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	dan Penguatan Sektor Keuangan)		
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR/ KOMISI VI	RUU dalam tahap Harmonisasi Surat Pengusul (Komisi VI) permintaan Harmonisasi (Surat No. B/16783/LG.01.01/12/2021 14 Desember 2021)
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Utara	DPR/ANGGOTA	• Surat Pengusul (Yan Permenas Mandenas F-Gerindra, permintaan Harmonisasi Nomor 669/I/A- 136/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 (Kumulatif Terbuka)
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara	DPR/KOMISI II	Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi Nomor B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022 (Kumulatif Terbuka)
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan	DPR/KOMISI II	• Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi Nomor B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022 (Kumulatif Terbuka)
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur	DPR/KOMISI II	Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi Nomor B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022 (Kumulatif Terbuka)
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah	DPR/KOMISI II	• Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi Nomor B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022 (Kumulatif Terbuka)
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat	DPR/KOMISI II	Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi Nomor B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022 (Kumulatif Terbuka)
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku	DPR/KOMISI II	Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi Nomor B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022 (Kumulatif Terbuka)
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah	DPR/KOMISI II	Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi Nomor B/265/LG.01.01/7/2022 tanggal 5 Juli 2022 (Kumulatif Terbuka)
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali	DPR/KOMISI II	Selesai Harmonisasi Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi (B/1038/LG.01.01/1/2022 tanggal 17 Januari 2022) RUU Kumulatif Terbuka

IV. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR RI [7 RUU TERDIRI DARI 4 RUU USUL BALEG, 2 RUU USUL KOMISI, 1 RUU USUL ANGGOTA]

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/KOMISI I	Proses penyusunan di Komisi I
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR/ KOMISI IX	Proses penyusunan di Komisi IX
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR/ BADAN LEGISLASI	Proses penyusunan di Badan Legislasi
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.	DPR/ANGGOTA	Proses penyusunan di Anggota

V. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH (3 RUU)

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)	PEMERINTAH	Proses Penyusunan di internal Pemerintah (Pemrakarsa Kementerian Kesehatan)
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	PEMERINTAH	Proses Penyusunan di internal Pemerintah (Pemrakarsa Kementerian Komunikasi dan Informasi)

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
	Elektronik.		
3.	RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)	PEMERINTAH	Proses Penyusunan di internal Pemerintah (Pemrakarsa Kementerian Hukum dan HAM)

VI. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPD

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG- UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.			

VII. RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU [21 RUU TERDIRI DARI 4 (EMPAT) RUU USUL DPR, 2 (EMPAT) RUU USUL PEMERINTAH DAN 15 (LIMA BELAS) RUU KUMULATIF TERBUKA]

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara (Omnibus law)	PEMERINTAH	 Surpres tgl 29 September 2021 nomor R-44/Pres/09/2021 Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 18 Januari 2022 Sudah menjadi UU No. 3 Tahun 2022
	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD	 Surpres Tgl 16 Juni 2021 No. R-28/Pres/06/2021 Surpres tgl 16 Juni 2021 NoR-28/Pres/06/2021 (Menteri Desa PDDT, Mendagri, Menkeu, dan Mekumham) Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tgl 13 Juli 2020 MP IV 2019-2020 dibahas oleh Komisi V Rapat Konsultasi Pengganti Rapat bamus Tgl 3 November 2021 MP II 2020-2021 dibahas di Badan Legsilasi RUU Proses Pembicaraan TK.I di Badan Legislasi Raker 27 Januari 2022 antara Baleg, PPUU DPD, dan Pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan Pembicaraan Tk. I. Paripurna 8 Februari 2022 memutuskan Pembahasan Tk. 1 RUU BUMDes tidak dilanjutkan.
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	DPR	RUU Kumulatif Terbuka Selesai Harmonisasi Tgl 23 September 2021 Surpres Tgl 30 November 2021 Nomor: R-54/Pres/11/2021 (Mendagri, Menkeu, MenPPN/Kepala Bappenas & Menkumham)

	Per 7 Juli 2022		
			 Pembahasan di Komisi II Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 15 Februari 2022 Sudah menjadi UU No. 6 Tahun 2022
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	DPR	RUU Kumulatif Terbuka Selesai Harmonisasi Tgl 23 September 2021 Surpres Tgl 30 November 2021 Nomor: R-54/Pres/11/2021 (Mendagri, Menkeu, MenPPN/Kepala Bappenas & Menkumham) Pembahasan di Komisi II Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 15 Februari 2022 Sudah menjadi UU No. 5 Tahun 2022
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	DPR	RUU Kumulatif Terbuka Selesai Harmonisasi Tgl 23 September 2021 Surpres Tgl 30 November 2021 Nomor: R-54/Pres/11/2021 (Mendagri, Menkeu, MenPPN/Kepala Bappenas & Menkumham) Pembahasan di Komisi II Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 15 Februari 2022 Sudah menjadi UU No. 4 Tahun 2022
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	DPR	RUU Kumulatif Terbuka Selesai Harmonisasi Tgl 23 September 2021 Surpres Tgl 30 November 2021 Nomor: R-54/Pres/11/2021 (Mendagri, Menkeu, MenPPN/Kepala Bappenas & Menkumham) Pembahasan di Komisi II Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 15 Februari 2022 Sudah menjadi UU No. 9 Tahun 2022
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	DPR	RUU Kumulatif Terbuka Selesai Harmonisasi Tgl 23 September 2021 Surpres Tgl 30 November 2021 Nomor: R-54/Pres/11/2021 (Mendagri, Menkeu, MenPPN/Kepala Bappenas & Menkumham) Pembahasan di Komisi II Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 15 Februari 2022 Sudah menjadi UU No. 8 Tahun 2022
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	DPR	RUU Kumulatif Terbuka Selesai Harmonisasi Tgl 23 September 2021 Surpres Tgl 30 November 2021 Nomor: R-54/Pres/11/2021 (Mendagri, Menkeu, MenPPN/Kepala Bappenas & Menkumham) Pembahasan di Komisi II Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 15 Februari 2022 Sudah menjadi UU No. 7 Tahun 2022
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Keolahragaan (dalam Prolegnas tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional)	DPR	 Surpres Tgl 18 Juni 2021 R-29/PRES/06/2021 Pembahasan di Komisi X Disetujui menjadi UU Keolahragaan pada Rapur 15 Februari 2022 Sudah menjadi UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

	Per / Juli 2022		
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	DPR	RUU Kumulatif Terbuka Selesai Harmonisasi Tgl 23 September 2021 Surpres Tgl 30 November 2021 Nomor: R-54/Pres/11/2021 (Mendagri, Menkeu, MenPPN/Kepala Bappenas & Menkumham) Pembahasan di Komisi II Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 15 Februari 2022 Sudah menjadi UU No. 10 Tahun 2022
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (dalam Prolegnas tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual)	DPR	 Selesai Penyusunan Tgl 8 Desember 2021 Disetujui menjadi RUU usul DPR pada Paripurna Tgl 18 Januari 2022 Disetujui menjadi UU pada Paripurna Tgl 12 April 2022 Sudah menjadi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR	Selesai Harmonisasi Tgl 8 Mei 2020 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 12 Mei 2020 Surpres Tgl 20 Juli 2020 No. R-33/Pres/07/2020 (Menteri Sosial, Mendagri, Menkeu, Menpan RB, Menkes, dan Menkumham) Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 27 Agustus 2020 dibahas oleh Komisi VIII RUU proses Pembicaraan Tk I di Komisi VIII Paripurna 31 Mei 2022 memutuskan Pembahasan Tk. 1 RUU Penanggulangan Bencana tidak dilanjutkan.
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	DPR	 Selesai Penyusunan di Baleg 7 Februari 2022 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 8 Februari 2022; Selesai Pembicaraan Tk. I di Baleg 13 April 2022 Disetujui menjadi UU pada paripurna tanggal 24 Mei 2022 Sudah menjadi UU No. 13 Tahun 2022
12.	RUU tentang Provinsi Riau	DPR	RUU Kumulatif Terbuka • Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 8 Februari 2022; • Disetujui menjadi UU pada paripurna tanggal 30 Juni 2022 • Sudah menjadi UU No Tahun 2022
13.	RUU tentang Provinsi Jambi	DPR	 RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 8 Februari 2022; Disetujui menjadi UU pada paripurna tanggal 30 Juni 2022 Sudah menjadi UU No Tahun 2022
14.	RUU tentang Provinsi Sumatera Barat	DPR	 RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 8 Februari 2022; Disetujui menjadi UU pada paripurna tanggal 30 Juni 2022 Sudah menjadi UU No Tahun 2022
15.	RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur	DPR	 RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 8 Februari 2022; Disetujui menjadi UU pada paripurna tanggal 30 Juni 2022 Sudah menjadi UU No Tahun 2022

Per 7 Juli 2022

16.	RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat	DPR	 RUU Kumulatif Terbuka Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna 8 Februari 2022; Disetujui menjadi UU pada paripurna tanggal 30 Juni 2022 Sudah menjadi UU No Tahun 2022
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan	DPR	RUU Kumulatif Terbuka Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi (B/1039/LG.01.01/1/2022 tanggal 17 Januari 2022) Disetujui menjadi UU pada paripurna tanggal 30 Juni 2022 Sudah menjadi UU No Tahun 2022
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Tengah	DPR	RUU Kumulatif Terbuka Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi (B/1039/LG.01.01/1/2022 tanggal 17 Januari 2022) Disetujui menjadi UU pada paripurna tanggal 30 Juni 2022 Sudah menjadi UU No Tahun 2022
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah	DPR	RUU Kumulatif Terbuka Surat Pengusul (Kom II) permintaan Harmonisasi (B/1039/LG.01.01/1/2022 tanggal 17 Januari 2022) Disetujui menjadi UU pada paripurna tanggal 30 Juni 2022 Sudah menjadi UU No Tahun 2022
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi (RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi)	DPR	 Surat Pengusul (Desy Ratnasari/FPAN) No. 0028/DR.PAN/I/2020 tgl 27 Januari 2020 permintaan utk diharmonisasi Selesai Harmonisasi Tgl 29 Juni 2020 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 5 Oktober 2020 Surpres tgl 10 Desember 2020 nomor R-48/Pres/12/2020 Disetujui menjadi UU pada paripurna tanggal 7 Juli 2022 Sudah menjadi UU No Tahun 2022
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.	PEMERINTAH	 RUU Carry Over dari Periode 2014-2019 Disetujui menjadi UU pada paripurna tanggal 7 Juli 2022 Sudah menjadi UU No Tahun 2022